

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dinamika kebebasan pers pada masa awal transisi reformasi, menganalisis kebijakan terkait pers yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, serta menganalisis dinamika kebebasan pers pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo yang terdiri dari pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan kebebasan pers dimulai sejak era Presiden B.J Habibie dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pembubaran Departemen Penerangan dilakukan sehingga negara dapat melepaskan kontrol dan memicu transformasi peran pers yang menjalankan fungsi *watchdog*. Komitmen Presiden Abdurrahman Wahid terhadap kebebasan pers merupakan hasil perjalanan panjang pemikirannya jauh sebelum ia menjabat menjadi presiden. Tiga media yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini menunjukkan perbedaan pola, *Tempo* dengan jurnalisme investigasi, *Kompas* dengan jurnalisme perdamaian, dan *Jawa Pos* dengan Jurnalisme Perang. Pada era ini media online mulai berkembang pesat dengan format dotcom. *Tempo*, *Kompas*, dan *Jawa Pos* juga berkontribusi dalam praktik pengawalan transparansi dan skandal kekuasaan, dimana *Tempo* membahas skandal yang melibatkan aparat kepolisian dan militer, *Kompas* yang membahas situasi terkini di wilayah konflik, serta *Jawa Pos* yang membahas konflik dan skandal yang melibatkan elit politik. Kebebasan Pers ini menimbulkan kontradiksi berupa ketegangan antara pemerintah dan media massa, serta munculnya ancaman terhadap media dan jurnalis dari massa pendukung organisasi serta, aparat keamanan, pejabat, serta ancaman dan kondisi jurnalis di tengah wilayah konflik.

Kata Kunci: Abdurrahman Wahid, *Jawa Pos*, Kebebasan Pers, *Kompas*, *Tempo*.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the dynamics of press freedom in the early period of the reform transition, analyze press-related policies implemented during the administration of President Abdurrahman Wahid, and analyze the dynamics of press freedom during the administration of President Abdurrahman Wahid. The method used in this study is the historical research method according to Kuntowijoyo which consists of topic selection, heuristics, verification, interpretation and historiography. The results of the study indicate that the openness of press freedom began since the era of President B.J. Habibie with the issuance of Law Number 40 of 1999 concerning the Press. During the administration of President Abdurrahman Wahid, the dissolution of the Ministry of Information allowed the state to relinquish control and trigger a transformation in the role of the press, which had been acting as a watchdog. President Abdurrahman Wahid's commitment to press freedom was the result of a long journey of thought long before he became president. The three media outlets studied in this research demonstrate different patterns: Tempo with its investigative journalism, Kompas with its peace journalism, and Jawa Pos with its war journalism. In this era, online media began to develop rapidly with a dotcom format. Tempo, Kompas, and Jawa Pos also contributed to the practice of monitoring transparency and power scandals, with Tempo covering scandals involving the police and military, Kompas covering the current situation in conflict areas, and Jawa Pos covering conflicts and scandals involving political elites. This press freedom gave rise to contradictions in the form of tension between the government and the mass media, as well as the emergence of threats to the media and journalists from supporters of organizations, security forces, officials, and threats to and conditions of journalists in conflict areas.

Keywords: Abdurrahman Wahid, *Jawa Pos*, Press Freedom, *Kompas*, *Tempo*.